



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan Padang Harapan Telp. (0736) 21585 – 22231
Home Page : www.pt-bengkulu.go.id E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

18 November 2016

Nomor : W8-U/80 /PL.01.10/XI/2016
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2016
Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang memerintahkan kepada setiap eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan Peradilan untuk menyusun sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 berupa coft copy (dalam bentuk pdf) dan Hard copy.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 (blanko terlampir)
3. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017, Tahun 2018
4. Reviu Indikator Kinerja Utama (bila ada reviu)
5. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (bila ada reviu)

Sehubungan dengan surat tersebut diatas maka diharapkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk segera menyelesaikan laporan yang diminta tersebut diatas, mempublikasikan dalam website masing-masing dan menyampaikan/mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu paling lambat tanggal 12 Februari 2017.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, *d.*

H. WAHJONO, SH.M.Hum
NIP. 195109191984031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016
Lampiran : 6 lembar
Hal : Penyampaian LKjIP Tahun 2016
dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

17 November 2016

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
 3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Pengadilan Militer Utama
 5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada empat lingkungan Peradilan
- di -
Tempat

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan setiap Eselon 1 dilingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama empat lingkungan Peradilan untuk menyusun sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 berupa *softcopy* (dalam bentuk .pdf) dan *hardcopy*.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 (blanko terlampir),
3. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017, Tahun 2018
4. Reviu Indikator Kinerja Utama (bila ada Reviu)
5. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (bila ada Reviu)

Dokumen-dokumen tersebut disampaikan/ dikirimkan paling lambat tanggal 28 Februari 2017 :

- Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Kepala Badan Urusan Administrasi cq Biro Perencanaan dan Organisasi, berupa *hardcopy* dan *softcopy* via email evlap_lkjp2015@yahoo.com serta di publikasikan dalam website masing-masing.

- Pengadilan Tingkat Pertama kepada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding.

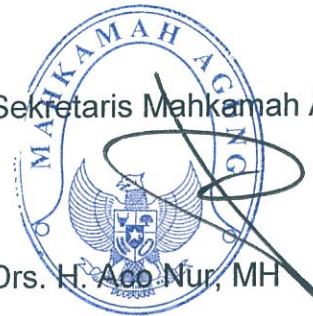
Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, LKjIP dan Indikator Kinerja Utama, agar dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi cq Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Badan Pengawasan.

Mengingat pentingnya LKjIP sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya, serta fungsinya sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan disampaikan kepada DPR RI sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN, maka diharapkan LKjIP Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat diserahkan tepat waktu.

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Dr. Drs. H. Aco Nur, MH



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Area 6 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

(Contact person : Naulina : 0812.9205425, Sadik : 0813.18862862)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

- Logo lembaga -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Panitera/ Kepala Badan/ Direktur Jenderal Badan Peradilan

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a :

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan

Anggaran

- 1.
- 2.

Rp.
Rp.

....., 2017

Panitera/ Kepala Badan/
Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum, Agama, Militer/TUN

Sekretaris

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

- Logo lembaga -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Ketua Pengadilan tkt Banding Umum/Agama/Militer/TUN

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a :

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum/Agama/Militer/TUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan

Anggaran

3.

Rp.

4.

Rp.

....., 2017

Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum, Agama, Militer, TUN

Ketua Pengadilan tk Banding
Umum, Agama, Militer, TUN

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

- Logo lembaga -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Ketua Pengadilan tk Pertama Umum/Agama/Militer/TUN

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a :

Jabatan : Ketua Pengadilan tk Banding Umum/Agama/Militer/TUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan

Anggaran

1.
2.

Rp.
Rp.

....., 2017

Ketua Pengadilan tk Banding
Umum/Agama/Militer/TUN

Ketua Pengadilan tk Pertama
Umum/Agama/Militer/TUN

(.....)

(.....)